BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan adalah program bersama berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha atau dunia industri, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program perlindungan sosial, program pemenuhan kebutuhan dasar, program pemberdayaan masyarakat dan program dukungan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pembangunan kesehatan suatu negara tidak dapat terlepas dari suatu sistem yang disebut dengan sistem kesehatan. Pada intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sistem kesehatan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sistem kesehatan tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan, tetapi meliputi pengembangan pembiayaan dan mekasnisme *risk pooling* sehingga dapat melindungi masyarakat dari beban keuangan dan beban ekonomi karena penyakit.

Dimensi lain menyangkut peningkatan kepuasan konsumen dan memberikan informasi dan pilihan, juga merupakan bagian penting dari sistem kesehatan. Sistem kesehatan juga harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dengan disitribusi yang adil. Sistem kesehatan tidak hanya menilai dan berfokus pada tingkat manfaat yang diberikan, tetapi juga bagaimana manfaat itu didistribusikan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sistem kesehatan melakukan empat fungsi yang meliputi pembiayaan, pemberian pelayanan, produksi sumber daya dan pembimbingan.

Dilihat dari kondisi kependudukan masyarakat Kota Sukabumi pada saat ini jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin di Kota Sukabumi tergolong masih cukup tinggi, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan dua puluh tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Kota Sukabumi menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan

pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada kinerja aparatur birokrasi menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah ditengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap layaknya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanannya.

Program jaminan kesehatan masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa dan posyandu. Sedangkan sasaran program adalah meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas seluruh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dikelola secara profesional oleh tenaga kesehatan yang sudah mengikuti sertifikasi profesi dan berdampak pada menurunnya penderita gizi buruk, gizi kurang serta meningkatnya aksesibilitas penduduk miskin ke pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan menggunakan jaminan atau asuransi kesehatan masyarakat miskin dengan *contact rate* nya mencapai satu kali setiap tahunnya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Sehubungan dengan itu, kinerja aparatur pemerintah sebagai perencana dan pelaksana suatu program kerja yang sudah dirancang dalam program kerjanya tersebut, diharapkan mampu memberikan suatu bentuk peningkatan pelayanan, khususnya peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Perlu diakui bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan selama ini masih meninggalkan akses-akses sampingan berupa keadaan lingkungan yang kurang stabil, perencanaan pembangunan yang kurang ditopang oleh analisa dampak lingkungan serta tindak lanjut implementasi yang kurang cermat sehingga dikhawatirkan kesemuanya itu menjadi pokok permasalahan secara otomatis dapat menggangu kualitas lingkungan masyarakat secara timbal balik.

Berdasarkan observasi awal peneliti kinerja Bappeda Kota Sukabumi dalam peningkatan akses layanan dan derajat kesehatan pada program pelayanan kesehatan penduduk miskin Kota Sukabumi yang bermutu mewujudkan pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta harapan. Pertama, permasalahan responsivitas pelayanan terhadap masyarakat belum siapnya para aparatur dalam penyelenggaraan program-program yang telah terencana belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena beberapa kendala seperti jumlah dana, infrastruktur dan lain sebagainya sehingga pelayanan terhadap pengguna jasa belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, kualitas layanan yang sangat diutamakan dalam suatu kinerja pemerintah sangat diutamakan karena hal tersebut dapat mempengaruhi semua aspek perkerjaan yang dianggap masyarakat kurang bagus dan bahkan bisa dianggap tidak bisa melayani masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan aparat birokrasi sering kali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan yang telah terprogram belum sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan. Masih banyak pengguna jasa yang merasa masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelayanan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan serta pemberian informasi yang kurang jelas. Keempat, program-program yang disosialisasikan kepada masyarakat belum dapat diterima karena tidak semua masyarakat paham akan program-program yang terlah direncanakan oleh para birokrat.

Kinerja Bappeda Kota Sukabumi yang dihadapi masyarakat Kota Sukabumi, khususnya di bidang kesehatan dengan peningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan masyarakat miskin di Kota Sukabumi. Hal itu merupakan tugas Bappeda dan masyarakat sebagai pengguna jasa mendukung apa yang telah dirancang oleh Bappeda agar mampu mewujudkannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan tugas dan fungsi daripada Bappeda Kota Sukabumi adalah bagaimana usaha-usaha yang mesti dilakukan dalam hal

perencanaan pembangunan baik dalam jangka pendek, menengah maupu dalam jangka panjang supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang serta hasil observasi yang telah dilakukan dengan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka penulis mengambil judul skiripsi **"Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Studi Tentang Peningkatan Akses Layanan dan Derajat Kesehatan Mayarakat Miskin)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di atas adalah Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Studi Tentang Peningkatan Akses Layanan dan Derajat Kesehatan Mayarakat Miskin)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Studi Tentang Peningkatan Akses Layanan dan Derajat Kesehatan Mayarakat Miskin). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui produktivitas kualitas pelayanan kinerja Bappeda dalam meningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan mayarakat miskin di Kota Sukabumi.

2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan kinerja Bappeda dalam meningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan mayarakat miskin di Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui responsivitas kinerja Bappeda dalam meningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan mayarakat miskin di Kota Sukabumi.
4. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Bappeda dalam meningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan mayarakat miskin di Kota Sukabumi.
5. Untuk mengetahui responsibilitas kinerja Bappeda dalam meningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan mayarakat miskin di Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan dan relevan mengenai kinerja Bappeda Kota Sukabumi pada peningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan masyarakat miskin, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan dalam kinerja Bappeda Kota Sukabumi dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Bagi Lembaga Akademik

Diharapkan penelitian ini berguna bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia khusunya Fakultas Ilmu sosial dan Politik yang hendak melakukan penelitian yang sama mengenai kinerja suatu organisasi.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Bappeda Kota Sukabumi sebagai suatu bahan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan kinerja dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah mengenai kinerja organisasi dalam meningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan masyarakat miskin di Kota Sukabumi.